



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan. . .

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II. . .

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
 - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB IV PENUTUP

Pasal 3

Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1621

LAMPIRAN XXV : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 51 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2026





**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BATAM**

RENJA 2026

PEMERINTAH KOTA BATAM



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) ini disusun untuk dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, September 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Batam,



RUDI PANJAITAN, S.STP,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19761123 199511 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I 1	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1. Pengertian Renja Perangkat daerah	1
1.1.2. Proses Penyusunan renja perangkat daerah.....	1
1.1.3. Keterkaitan Antar Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	3
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II 7	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	27
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD	30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	41
BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah.....	42
BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	53
BAB V PENUTUP	
5.1. Catatan Penting	66
5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.....	67
5.3. Rencana Tindak Lanjut.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.....	10
Tabel 2. 2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	24
Tabel 2. 3.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika	31
Tabel 2. 4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan	41
Tabel 3. 1.	Target Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika.....	43
Tabel 3. 2.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Batam	45
Tabel 4. 1.	Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.	Tahapan Penyusunan RKPD	2
Gambar 1. 2.	Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	2
Gambar 1. 3.	Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

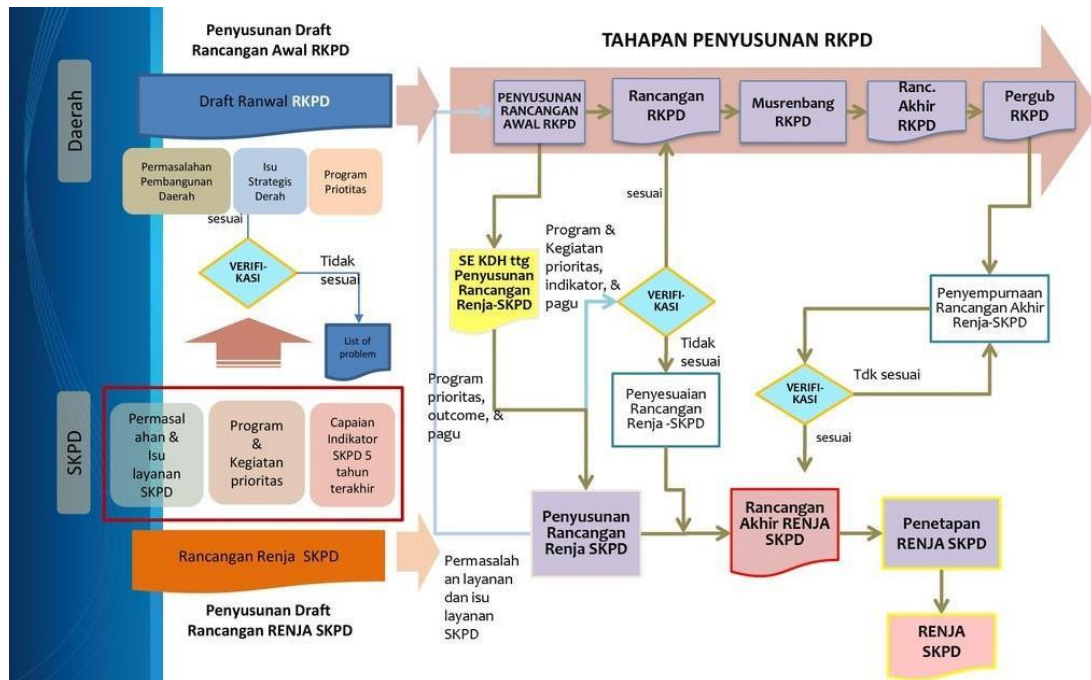
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

1.1.2. Proses Penyusunan renja perangkat daerah

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
- f. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.



Gambar 1. 1. Tahapan Penyusunan RKP

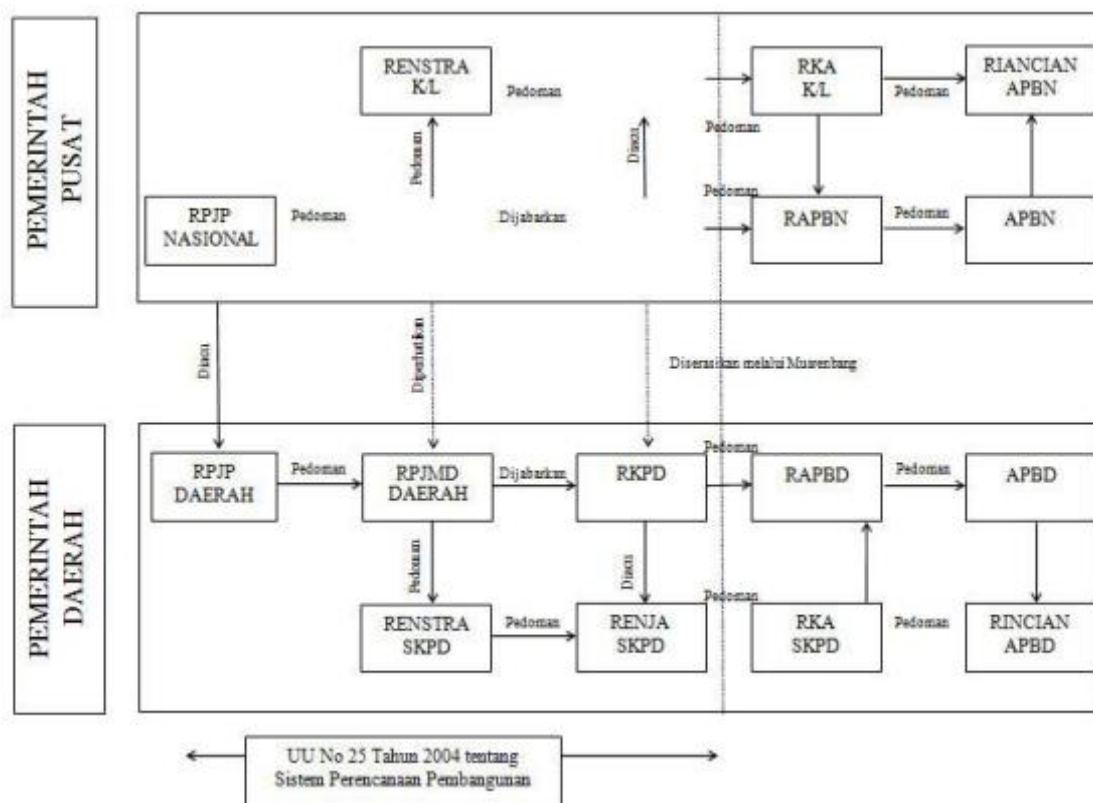


Gambar 1. 2. Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.1.3. Keterkaitan Antar Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. 3. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau : (7,44/2021))
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);
10. Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 adalah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 225 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1093);
12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor ... Tahun ... tentang Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025 – 2029;

13. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun Nomor 1614)
14. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2026, dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2026

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tahun 2026, meliputi :

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD)
 - 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
- BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

- 5.1. Catatan Penting
- 5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2024 sebagaimana tabel 2.1. dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a) Kegiatan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dari target fisik yaitu 244 tercapai 205
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a) Program Penyelenggaraan statistik Sektoral urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dari target 100 % tercapai 100 %
 - b) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dari target :
 - Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi yaitu 3 level tercapai 3 level
 - Tingkat kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi yaitu 3 level tercapai 3 level
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a) Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dari target :
 - Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE yaitu 3,00 tercapai 4,10
 - Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu 3,90 tercapai 4,10

- Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yaitu 4,00 tercapai 4,33
4. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja :
- a. Kegiatan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hal ini dikarenakan ada perubahan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja :

- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial tercapai target kinerja dikarenakan seluruh perangkat Daerah di Pemerintah Kota Batam menggunakan data statistic sectorial dalam penyusunan perencanaan dan laporan.
- b. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi urusan Pemerintahan Bidang Persandian dikarenakan aturan dan kebijakan terkait keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Batam secara bertahap sudah dilengkapi.

Faktor penyebab melebihi target kinerja :

- a. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika melebihi target dikarenakan :
 - Komitmen pemerintah Kota Batam dalam hal membuat kebijakan - kebijakan tentang SPBE antara lain: Perwako tentang SPBE, Perwako tentang SDI, Perwako tentang Keamanan Informasi dan Kebijakan - kebijakan lain yang menjadi turunannya
 - Komitmen pemerintah Kota Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam mengembangkan atau membangun Layanan Publik dan Layanan administrasi pemerintah Dengan berpedoman kepada SK Walikota Batam tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE dan juga Komitmen semua OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam dalam membangun Kolaborasi dibidang SPBE
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah :
- a. Tercapainya target SPBE Pemerintah Kota Batam dari target 3,18 tercapai 3,77. Dimana kota Batam mendapat nilai tertinggi se Provinsi Kepulauan Riau dan terbaik ke 4 se Sumatera.
 - b. Diskominfo Kota Batam mendapatkan nilai keterbukaan informasi publik dengan predikat inofatif dengan nilai indeks 82,7
 - c. Diskominfo Kota Batam mendapatkan penghargaan Ombudsman kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terbaik.

d. Diskominfo Kota Batam mendapatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik dengan kategori cukup

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan/tahun 2025)
Kota Batam

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan								
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)							
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
2	16	0	1		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-				
						Nilai SAKIP PD	73,60	-	-	-	-	-					
						Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	76,61	-	-	-	-	-					
2	16	0	2.0	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	-				
2	16	0	2.0	01	1	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 ASN	38 ASN	82 ASN	82 ASN	82 ASN	40 ASN	40 ASN	-
2	16	0	2.0	02	1	2	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	16	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	0	0	0	0	0	100%	100%	-
2	16	0	2.0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 ASN	0 ASN	0 ASN	0 ASN	0 ASN	48 ASN	48 ASN	-
2	16	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
2	16	0	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-
2	16	0	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	-
2	16	0	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	-
2	16	0	2.0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-
2	16	0	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	1 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-
2	16	0	2.0		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Urusan Pemerintah	daerah yang terpenuhi									
2	16 0 1 7	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	40 unit	0	-	-	6 unit	6 unit	-
2	16 0 1 7	05 Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mabel	20 unit	0	12 unit	12 unit	100%			
2	16 0 1 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
2	16 0 1 8	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber, Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-
2	16 0 1 8	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-
2	16 0 1 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
2	16 0 1 9	01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarka Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
2	16 0 1 9	02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarka Pajaknya	7 unit	4 unit	7 unit	7 unit	7 unit	8 unit	8 unit	-
2	16 0 1 9	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	-
2	16 0 2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	74.59	74.59	74.59	79.68		74.59	74.59	-
2	16 0 2 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	2 dokumen	12 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-			
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	12 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	-			
2	16	0 2	2.0 1	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
2	16	0 2	2.0 1	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	62 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
2	16	0 2	2.0 1	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	12 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	-
2	16	0 2	2.0 1	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 layanan	1 layanan	3 layanan	3 layanan	3 layanan	1 layanan	1 layanan	-
2	16	0 2	2.0 1	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
2	16	0 2	2.0 1	00 13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27 unit	0	27 unit	27 unit		45 unit	45 unit	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
2	16	03			PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.00; 3.40; 3.16	3.90; 3.60; 3.33	3.00; 3.40; 3.16	4.10;4.10; 4.33	3.00; 4.00; 4.00	3.00; 4.00; 4.00	-
						Tingkat Ketersediaan Aplikasi Informatika	3,79	-	-	-	-	-	-
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah (berdasarkan pemetaan data penilaian kepatuhan standart pelayanan publik 543)	244	205	244	370	264	264	-
						Jumlah dokumen penetapan Nama Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	9 Domain	8 Domain	9 Domain	9 Domain	10 Domain	10 Domain	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	16	0 3	2.0 1	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-		
2	16	0 3	2.0 1	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	27 Unit	24 Unit	27 Unit	-	-	33 Unit	33 Unit	-
2	16	0 3	2.0 2		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola; Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola	3.25; 3.25	3.25; 3.25	3.25; 3.25	3.00; 4.00	-	3.25 ; 4.00	3.25 ; 4.00	-
						Jumlah Dokumen e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
					Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	2 dokumen	2 dokumen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	16	0	2.0	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 dokumen	2 dokumen	0	0	0	2 dokumen	2 dokumen	-
2	16	0	2.0	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	-	1 unit	1 unit	-
2	16	0	2.0	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
2	16	0	2.0	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	39 unit	38 unit	39 unit	39 unit	-	40 unit	40 unit	-
2	16	0	2.0	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	-	4 layanan	4 layanan	-
					Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	0	0	0	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	16	0 3	2.0 2	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	0	0	0	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2	21	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi; Tingkat Kematangan Kebijakan Internal	3.00; 3.00	3.00; 3.00	3.00; 3.00	3.00; 4.00	-	3.00; 3.00	3.00; 3.00	-
					Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	299	-	-	-	-	-	-	-	-
2	21	0 2	2.0 1		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan	100%	63.75%	63,75%	100%	-	85.83%	85.83%	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Kabupaten/Kota										
		Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100%	-	-	-		-	-	-	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0	0	0	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	-	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	-	-	5 laporan	5 laporan	-	
2	21	0 2	2.0 1	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-
2	21	0 2	2.0 1	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan	45 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Informasi												
2	21	0 2	2.0 2		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat	Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah yang teramankan	0%	57,14%	0%	-	-	100%	100%	-
						Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	45	-	-	-	-	-	-	-
2	21	0 2	2.0 2	01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	45 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	100%	-	-	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	-
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2	20	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
						Persentase ketersediaan data	50 %	-	-	-	-	-	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Statistik Sektoral yang dapat dibagipakaikan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah												
2	20	0 2	2.0 1		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	100%	100%	100%	100%	-			
						Jumlah Produsen Data yang menyediakan Data Statistik Sektoral	50%	-	-	-	-			
2	20	0 2	2.0 1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	0	1 Dokumen	0	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
					Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-
					Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	0	0	0	-	-	10 orang	10 orang	-
	20	0	2.0	00	Membangun Metadata		1 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 1 03	Statistik Sektoral									

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Renstra Dinas Kominfo Tahun 2021-2026 dan Rancangan Akhir Renstra 2025-2029. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Batam

No	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan/ Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Indeks SPBE			3,47	3,66	3,79	3,80	3,77	-	-	-	
2	Nilai Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE; Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE: Nilai Indeks Domain Layanan SPBE; Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE			3,00	3,00	-	-	4,10	-	-	-	
				3,30	3,70			3,50				
				3,93	4,00			4,19				
				2,81	3,18			2,73				
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik			87	87	-	-		-	-	-	
4	Persentase layanan publik berbasis digital			-	-	62 %	64 %	-	-			
5	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kota Batam			-	-	74	74	-	-			
6	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral			-	-	50 %	60 %	-	-			
7	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam (nilai indeks)			-	-	73,60	74,60	-	-			
8	Persentase masyarakat yang	-	√	74.59 %	74.59 %	74.59 %	-	79.68 %	-	74.59 %	-	Dilakukan penilaian dari

	menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota											jumlah pengunjung di website batam.go.id. Terdapat penambahan Tingkat partisipasi kunjungan ke laman yang
9	Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	-	√	100%	100%	100%	-	100%	-	100%	-	Seluruh Kecamatan dan Kelurahan mendapat penyebaran informasi publik, baik melalui media, maupun pelaksanaan kegiatan secara langsung di setiap Kecamatan
10	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	-	-	3.00; 3.90; 4.00	3.00; 4.00; 4.00	3.00; 4.00; 5.00	-	4.10; 4.10; 4.33	-	3.00; 4.00; 5.00	-	Nilai diperoleh dari LHE indeks SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB
11	Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah (berdasarkan pemetaan data penilaian kepatuhan standart pelayanan publik 543)	-	-	254	264	274	-	370	-	274	-	Terjadi perubahan regulasi dari Pusat, sehingga target tidak tercapai. Jumlah layanan yang sudah disiapkan dilakukan penyesuaian dengan
12	Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola; Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola	-	-	3.25; 3.50	3.25; 4.00	3.50; 4.00	-	3.00;4.00	-	3.50; 4.00	-	Nilai diperoleh dari LHE indek SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB
13	Persentase OPD yang menggunakan data statistik	-	√	100%	100%	100%	-	100%	-	100%	-	Seluruh OPD menggunakan data statistik sektoral dalam

	sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah											urusan perencanaan dan evaluasi
14	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	-	-	100%	100%	100%	-	100%	-	100%	-	Tersedianya data semua urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
15	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi; Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	-	-	3.00; 3.00	3.00; 3.00	3.00; 3.00	-	3.00;4.00	-	3.00; 3.00	-	Nilai diperoleh dari LHE indeks SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB
16	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan	-	-	79.17%	85.83%	100%	-	100%	-	100%	-	Instrumen Penyelenggaraan Keamanan Informasi yang terlaksana meliputi: 1 Peraturan Walikota, 2 SOP, 3 sertifikasi peningkatan kompetensi SDM, 3 kegiatan kontra penginderaan, 1 kegiatan evaluasi Indeks KAMI, dan 1 kegiatan IT Security Assessment, kegiatan pendaftaran aktivasi penerbitan dan pendampingan teknis terkait tanda tangan elektronik.
17	Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah yang teramankan	-	√	71.43%	85.71%	100%	-	100%	-	100%	-	Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

1. Sumber Daya Manusia (SDM):

- a. Perlunya dukungan SDM yang memiliki keterampilan dan kompetensi, baik di bidang statistik, manajemen dan pengelolaan data, pelayanan informasi publik, aplikasi, jaringan dan manajemen SPBE, serta pengelolaan pengaduan masyarakat (SP4N Lapor, PPID, PBNN dan SKM), serta urusan kehumasan, dimana untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tersebut dibutuhkan pembinaan dan pelatihan guna menunjang pencapaian kinerja dan target organisasi;
- b. Belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia dari sisi jumlah dan kapasitas yang bertugas sebagai operator Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112 dan CCTV, yang juga membutuhkan pelatihan dan kompetensi seperti keahlian untuk penanganan tindak pidana dan keamanan yang terjadi dan termonitor oleh CCTV diluar dari wewenang aparat hukum;

2. Anggaran

- a. Perlunya anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan Statistik Sektoral, pemenuhan kebutuhan pelaksanaan dan pengembangan Teknologi Informasi maupun membangun infrastruktur jaringan;
- b. Perlunya anggaran yang memadai untuk peremajaan peralatan kehumasan seperti kamera, lensa, dan komputer, pengadaan server khusus yang memiliki kapasitas besar untuk menampung foto dan video - video kehumasan, maupun ruang kreasi/studio khusus kehumasan untuk pembuatan podcast, video dan yang lainnya.

3. Sarana dan Prasarana:
 - a. Infrastruktur jaringan intra belum merata, terutama fasilitas pendukung seperti server, perangkat keras, dan perangkat lunak yang tidak up-to-date sehingga menciptakan ketergantungan pada teknologi lama yang tidak lagi efisien;
 - b. Pusat Data (Data Centre) Dinas belum Terstandarisasi Baik Secara Nasional Maupun Internasional. Belum melampirkan bukti Standarisasi Pusat Data (Data Centre) di Lingkungan Pemko Batam (LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023 PADA PEMERINTAH KOTA BATAM).

B. Permasalahan Eksternal

- a. Perlunya upaya pembinaan dari Instansi Pembina Data Statistik (Badan Pusat Statistik);
- b. Perlunya peningkatan upaya dari setiap Produsen Data dalam melaksanakan statistik sektoral yang berkualitas ;
- c. Perlunya komitmen bersama Perangkat daerah di pemko batam dan instansi terkait dalam meningkatkan penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- d. Perlunya komitmen bersama Perangkat daerah di pemko batam dan instansi terkait dalam meningkatkan pelayanan informasi publik;
- e. Perlunya upaya pembuatan Peraturan Wali Kota mengenai kerjasama dengan media di Kota Batam;
- f. Perlunya peningkatan upaya komunikasi dengan dewan pers dan media agar berita-berita hoax tidak mudah tersebar di Kota Batam;
- g. Masih adanya Nomor Darurat yang lain sehingga tidak menjadikan NTPD 112 sebagai Nomor Tunggal Panggilan Darurat satu satunya di Kota Batam, seperti Kepolisian dengan nomor Darurat 110, Layanan Ambulan Kementrian Kesehatan 119, Basarnas 115, Bencana Alam 129.
- h. Tidak adanya aturan Konkuren terkait dengan Bidang Tugas dan Urusan dari Kementrian Kominfo, Badan Pusat Statistik dan BSSN sebagai pembina pusat untuk urusan Pelayanan NTPD 112 Layanan CCTV;
- i. Luasnya cakupan wilayah kerja hingga ke daerah hinterland yang disertai dengan terbatasnya anggaran dan infrastuktur baik berupa kendaraan dinas maupun kelengkapan jaringan;
- j. Sering terjadinya permasalahan terganggunya aplikasi umum SPBE seperti SP4N Lapor, PPID, Srikandi, SIPD, dll.

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

A. Kekuatan (*Strength*)

1. Kebijakan dalam melaksanakan kegiatan statistik sektoral sudah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pusat Statistik ;
2. Kebijakan dalam melaksanakan Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah sudah ditetapkan melalui Permendagri dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Komitmen ASN Diskominfo dalam mendukung kinerja organisasi agar bergerak sesuai tupoksi dalam pengembangan komunikasi, informatika, statistik dan keamanan informasi;
4. Tersedianya ASN yang cukup yang berpotensi untuk menjadi Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui peningkatan kompetensi;
5. Adanya Komitmen Pimpinan untuk tetap melaksanakan Pelayanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dan CCTV di Kota Batam.

B. Kelemahan (weaknesses)

1. Pelayanan di bidang data masih belum optimal karena masih rendahnya tingkat ketersediaan data akibat kurangnya respon dari produsen data atas koordinasi yang telah dilakukan;
2. Terbatasnya SDM yang berkeahlian dan kompeten di bidang Statistik, kehumasan, pengelolaan e-government, dan PIPP;
3. Belum optimalnya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagai acuan Pengembangan SPBE yang meliputi Teknologi, Infrastruktur, SDM, Anggaran, Manajemen dan Tata Kelola SPBE;

Untuk pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

1. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik dan Layanan NTPD 112 dan CCTV sehingga dibutuhkan kesiapan fasilitas dan SDM;
2. Pesatnya perkembangan Teknologi Digital yang harus diiringi dengan peningkatan infrastruktur dan kualitas Sumber Daya Manusia, keamanan informasi dan persandian, serta penyelenggaraan statistik sektoral

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam yaitu:

1. Meningkatnya kebutuhan pelayanan informasi publik;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Batam akan pentingnya pemanfaatan data statistik sektoral dan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Meningkatnya kesadaran ASN terhadap kebutuhan akan kompetensi dan keahlian.

2.3.3. Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kritikal, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam antara lain:

1. Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Kota Batam.
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota Batam.
3. Pengembangan implementasi e-Government Pemerintah Kota Batam.
4. Pengembangan aplikasi layanan berbasis android dan ios.
5. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman.
6. Penataan sistem informasi, aplikasi dan database yang terintegrasi dilingkungan Pemerintah Kota Batam.
7. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.
8. Ketersediaan data statistik sektoral yang dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan di Pemerintah Kota Batam.
9. Pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi, dan Informatika Kota Batam yang menguasai teknologi informasi.
10. Peningkatan kolaborasi Pemerintah Kota Batam dengan pihak media

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berkaitan dengan arah kebijakan RKPD.

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3. Review terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Batam

No	Rancangan RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Batam	1.Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE; 2.Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3.Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.00 4.00 5.00	6.793.637.711	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Batam	1.Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE; 2.Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3.Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.00 4.00 5.00	6.827.846.144,00	
2	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah (berdasarkan pemetaan data penilaian kepatuhan standart pelayanan publik 543)	274	67.355.879	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah (berdasarkan pemetaan data penilaian kepatuhan standart pelayanan publik 543)	274	64.990.000,00	
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Batam		274	67.355.879	Sub. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Batam		1 dokumen	64.990.000,00	
3	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola	3.25 4.00	6.726.281.832	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola	3.25 4.00	6.762.856.144,00	
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Batam	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	27	665.820.000	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Batam	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	27 Perangkat Daerah	1.186.982.300,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub. Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Batam	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	41	1.499.254.032	Sub. Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Batam	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	13 Aplikasi	1.303.385.544,00	
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Batam	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	1.661.754.000	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Batam	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	1.803.096.900,00	
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Batam	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 Aplikasi	129.279.800	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Batam	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 Aplikasi	102.953.000,00	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Akses Internet	Batam	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	41	2.370.500.000	Sub. Kegiatan Penyediaan Akses Internet	Batam	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	27 Perangkat Daerah	2.153.356.800,00	
	Sub. Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Batam	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen	249.872.000	Sub. Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Batam	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen	213.081.600,00	
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan	1 Dokumen	149.802.000	-	-	-	-	-	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas								
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Batam	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3.00	383.228.000	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Batam	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3.00	134.825.400,00	
			Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3.00				Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3.00		
5	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan Informasi Pemda	85.83%	378.928.000	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan Informasi Pemda	85.83%	134.825.400,00	
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Batam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	32.624.000	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Batam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	9.856.000,00	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Batam	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	3 Perangkat Daerah	286.950.000	Sub. Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Batam	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	45 Perangkat Daerah	106.785.000	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub. Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Batam	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	44.574.000	Sub. Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Batam	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	18.184.400,0	
6	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah yang teramankan	85.71%	4.300.000	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah yang teramankan	85.71%	0	
	Sub. Kegiatan Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Batam	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	1 Kegiatan	4.300.000	-	-	-		0	
7	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Batam	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	100%	341.649.000	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Batam	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	100%	42.720.000,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	100%	341.649.000	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	100%	42.720.000,00	
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Batam	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100%	48.191.000	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Batam	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100%	15.120.000,00	
	Sub. Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Batam	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100%	74.930.000	Sub. Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Batam	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100%	13.800.000,00	
	Sub. Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Batam	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	100%	118.528.000	-	-	-	-	0	
	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektora	Batam	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	8 orang	50.000.000	-	-	-	-	0	
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Batam	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100%	50.000.000	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Batam	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100%	13.800.000,00	
9	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Batam	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas	74,59%	11.472.635.792	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Batam	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	74,59%	10.258.130.232,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota								
10	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	100%	11.472.635.792	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	100%	10.258.130.232,00	
	Relasi Media	Batam	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	250.000.000	Relasi Media	Batam	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	264.747.600,00	
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Batam	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	531.744.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Batam	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	100.468.800,00	
	Pelayanan Informasi Publik	Batam	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohon	989.270.000	Pelayanan Informasi Publik	Batam	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohon	23.725.000,00	
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Batam	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12	450.000.000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Batam	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	240 Rekomendasi	195.733.888,00	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Batam	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola	125	7.501.621.792	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Batam	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun	100 Media	8.835.306.204,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis					pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis			
	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Batam	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	12 Dokumen	250.000.000	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Batam	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	12 Dokumen	217.436.764,00	
	Penyusunan Konten	Batam	Jumlah Konten Informasi Publik	12	1.500.000.000	Penyusunan Konten	Batam	Jumlah Konten Informasi Publik	100 Konten	620.711.976,00	
11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	18.284.410.457	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	18.801.534.173,00	
12	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	17.352.364.473	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	17.352.364.473,00	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang	17.296.354.473	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang	17.296.354.473,00	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	56.010.000,00	Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	56.010.000,00	
13	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	-	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	16.422.800,00	
	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	0	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.373.400,00	
	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	7.049.400,00	
14	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat	Batam	Persentase Administrasi Umum	100%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat	100%	-	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah		Perangkat Daerah yang terlaksana					Daerah yang terlaksana			
15	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	326.409.064	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	778.811.100,00	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.021.000	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	10.019.000,00	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	86.134.064	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	86.132.100,00	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	5.000.000,00	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.274.000	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	49.926.600,00	
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	210.980.000	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	627.733.400,00	
16	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase kebutuhan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	293.540.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase kebutuhan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	325.340.800,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	293.540.000	Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	325.340.800,00	
17	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	51.281.920	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	6.200.000,00	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	6.210.000	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.200.000,00	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam		1	45.071.920	-	-	-	-	0	
18	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	260.815.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	322.395.000,00	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.780.000	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	71.480.000,00	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	144.665.000	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	174.545.000,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	76.370.000	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	76.370.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal bottom up yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Batam hingga Tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan top down dari kunjungan kerja Wali Kota dan Reses DPRD.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjarangan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui SIPD yang diajukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Selanjutnya akan ditentukan usulan prioritas yang dapat diakomodir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kota Batam

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	
	N I H I L					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menggariskan Visi Indonesia tahun 2026 yaitu Menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2026 berada pada tahap jangka menengah yang pertama yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045 dengan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, maka keluaran (output) kegiatan yang dihasilkan adalah Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut tentunya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam secara spesifik berada pada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021-2026. Adapun tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah :

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi”

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE;
2. Meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi publik;

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja PD Tahun 2026 mengacu pada Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel.

Tabel 3. 1. Target Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Batam Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2026
1	Meningkatkan tata kelola pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Nilai Indeks SPBE	3.79
2	Penguatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintah	Persentase layanan publik berbasis digital	62 %
3	Meningkatnya keamanan siber daerah	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kota Batam	74
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	50 %
5	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam (nilai indeks)	91,41

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2026 mengacu pada pencapaian visi misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026 yang dirinci dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 2021-2026. Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mencukung pencapaian Misi Ke-5 ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”*** Kota Batam Tahun 2021-2026. Dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu sebagai berikut ;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, didukung 6 kegiatan :
 - 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, didukung 1 kegiatan :
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, didukung 2 kegiatan :
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 2) Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah.
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, didukung 1 kegiatan:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, didukung 2 kegiatan :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 3. 2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Batam

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2.	16.	03			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE;	Batam	3.00	6.827.846.144,00	APBD		95.5%	7.615.497.434	
						2.Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		4.00						
						3.Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik		5.00						
2.	16.	03.	2.	01	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain DiLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah	Batam	274	64.990.000,00	APBD		1 Dokumen	100.000.000	
2.	16.	03.	2.	01	0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Batam	3.00; 4.00; 4.00 Indeks 3 Indeks 4.00 Indeks 1 Dokumen	64.990.000,00	APBD		1 Dokumen	100.000.000
2.	16.	03.	2.	02	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola	Batam	3.50	6.762.856.144,00	APBD		1 Dokumen	7.515.497.434	
						2.Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola		4.00						

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	16	03	2	02	0032	Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan dan atau dikelola (akumulatif)	Batam	41 Aplikasi	1.303.385.544,00	APBD		13 Aplikasi	1.317.423.434,00
2	16	03	2	02	0034	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan yang saling Terhubung (akumulatif)	Batam	4 Layanan	102.953.000,00	APBD		4 Aplikasi	200.000.000,00
2	16	03	2	02	0033	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Keterhubungan Pusat Kendali dengan Pusat Data Nasional	Batam	1 Dokumen	1.803.096.900,00	APBD		1 dokumen	1.661.754.000,00
2	16	03	2	02	0037	Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 Domain Arsitektur dan Peta Rencana yang diusulkan	Batam	1 Dokumen	213.081.600,00	APBD		1 Dokumen	300.000.000,00
2	16	03	2	02	0038	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan sosialisai program kabupaten/kota cerdas	Batam	Jumlah Perangkat Daerah	0	APBD			0
2	16	03	2	02	0024	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Batam	Jumlah Perangkat Daerah	1.186.982.300,00	APBD		29 Perangkat Daerah(Dishub + Dispora)	1.665.820.000,00
2.	21.	02				Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Kemanan Informasi	Batam	3.00	134.825.400,00	APBD			337.561.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Informasi	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal					
2. 21. 02. 2. 01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan Informasi Pemda	Batam	100%	134.825.400,00	APBD		100%	332.831.400
2 21 02 2 01 0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Batam	1 Laporan	9.856.000,00	APBD		1 laporan	35.886.400
2 21 02 2 01 0007	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Batam	1 Dokumen	106.785.000,00	APBD		45 perangkat daerah	296.945.000
2 21 02 2 01 0008	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Batam	1 Dokumen	18.184.400,00	APBD		0	0
2. 20. 2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam Perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	Batam	100%	42.720.000,00	APBD		60%	650.000.000
2. 20. 02. 2. 01	Kegiatan Penyelenggaraan	Persentase data statistik	Batam	100%	42.720.000,00	APBD		45%	650.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
						Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	sektoral yang tersedia						
2	20	02	2	01	0017	Sub Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Batam	100%	15.120.000,00	APBD		
2	20	02	2	01	0018	Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang Telah Dilengkapi Metadata	Batam	100%	13.800.000,00	APBD		200.000.000
2	20	02	2	01	0021	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik sektoral sesuai standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data statistik	Batam	100%	13.800.000,00	APBD	4 Aplikasi	200.000.00
2.	16.	02				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Batam	74,59%	10.258.130.232,00	APBD	74.59	7.455.760.862
2.	16.	02.	2.	01	0021	Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Batam	100 %	8.835.306.204,00	APBD	100%	7.455.760.862

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	16	02	2	01	0014	Sub Kegiatan Relasi Media	Jumlah Aktivitas Relasi Media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi dewan pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media	Batam	12 Laporan	264.747.600,00	APBD		12 Laporan	295.600.000
2	16	02	2	01	0015	Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunikasi Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Batam	1 Komunitas	100.468.800,00	APBD		1 Komunitas	595.147.980
2	16	02	2	01	0017	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Batam	12 Pemohonan	23.725.000,00	APBD		12 permohonan	30.970.000
2	16	02	2	01	0019	Sub Kegiatan Monitoring Informasi, Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Batam	240 Rekomendasi	195.733.888,00	APBD		240 Rekomendasi	7.340.000
2	16	02	2	01	0022	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Batam	100%	217.436.764,00	APBD		12 permohonan	275.000.000
2	16	02	2	01	0023	Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Batam	100 Konten	620.711.976,00	APBD		100 Konten	1.650.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2.	16.	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Batam	100%	20.293.366.100,00	APBD		74.60%	16.586.498.820	
2.	16.	01.	2.	02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Batam	100%	18.844.196.400,00	APBD		100%	15.233.034.836	
2	16	01	2	02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dan diberi Tunjangan	Batam	100%	18.788.186.400,00	APBD		105 orang/bulan	15.177.024.836,00
2	16	01	2	02	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun	Batam	100%	56.010.000,00	APBD		1 dokumen	56.010.000
2.	16.	01.	2.	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Batam	100%	778.811.100,00	APBD		100%	326.409.064
2	16	01	2	06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Batam	100%	10.019.000,00	APBD		1 paket	10.021.000
2	16	01	2	06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Batam	100%	86.132.100,00	APBD		4 paket	86.134.064
2	16	01	2	06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Batam	100%	5.000.000,00	APBD		1 paket	5.000.000
2	16	01	2	06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Batam	100%	49.926.600,00	APBD		2 paket	14.274.000
2	16	01	2	06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang	Batam	100%	627.733.400,00	APBD		12 laporan	210.980.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					SKPD	dilaksanakan							
2.	16.	01.	2.	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Batam	100%	325.340.800,00	APBD	100%	592.245.000
2	16	01	2	07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Batam	100%	325.340.800,00	APBD	20 unit	231.303.000
2.	16.	01.	2.	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Batam	100%	6.200.000,00	APBD	100%	51.281.920
2	16	01	2	08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Batam	100%	6.200.000,00	APBD	12 laporan	6.210.000
2.	16.	01.	2.	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Batam	100%	322.395.000,00	APBD	100%	265.275.000
2	16	01	2	09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan	Batam	100%	71.480.000,00	APBD	1 unit	63.780.000
2	16	01	2	09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan jasa	Batam	100%	174.545.000,00	APBD	5 unit	144.665.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Operasional atau Lapangan	pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan							
2	16	01	2	09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Batam	100%	76.370.000,00	APBD		55 unit	56.830.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam pada perencanaan tahun 2026 merupakan tahun keempat dalam Renstra Tahun 2021 – 2026. Adapun rencana kerja beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1. Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						36.065.055.949,00								36.908.305.006,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						36.065.055.949,00							36.908.305.006,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						35.887.510.549,00							36.175.473.606,00		
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD	-			73.60	18.801.534.173,00						-	16.682.218.100,00		
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	-			100 Persentase	16.422.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	-	16.422.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9.373.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		9.373.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2 Laporan	7.049.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		7.049.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan</i>	-			100 Persentase	17.352.364.473,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	-	15.233.034.836,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				105 Orang/bulan	17.296.354.473,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		15.177.024.836,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	56.010.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		56.010.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran</i>	-			100 Persentase	778.811.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	-	778.815.064,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	10.019.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		10.021.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	86.132.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		86.134.064,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	49.926.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		49.926.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	627.733.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		627.733.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	-			100 Persentase	325.340.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	-	325.340.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	325.340.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		325.340.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-			100 %	6.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	-	6.210.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	6.200.000,00	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		6.210.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik</i>	-			100 Persentase	322.395.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	-	322.395.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	71.480.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		71.480.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	174.545.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		174.545.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				50 Unit	76.370.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		76.370.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	<i>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota</i>	-			74.59 %	10.258.130.232,00						-	11.877.758.072,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik</i>	-			100 Persen	10.258.130.232,00						-	11.877.758.072,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
			<i>Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terventikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media</i>				12 Laporan	264.747.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		295.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			<i>Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo</i>				1 Komunitas	100.468.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		595.147.980,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				12 Permohonan	23.725.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		30.970.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				240 Rekomendasi	195.733.888,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		195.733.888,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ukris				100 Media	8.835.308.204,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.835.308.204,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik														
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				12 Dokumen	217.438.784,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				100 Konten	620.711.978,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.650.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Ketersediaan Aplikasi Informatika	-			95 Persentase	6.827.846.144,00						-	7.615.497.434,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Nama Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	-			1 Dokumen	64.990.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam	-	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	64.990.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	6.762.856.144,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam	-	7.515.497.434,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				27 Perangkat Daerah	1.186.982.300,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		1.665.820.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE</i>				13 Aplikasi	1.303.385.544,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		1.317.423.434,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0033		Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali</i>				1 Laporan	1.803.096.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		1.661.754.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0034		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan														
			<i>Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</i>				4 Aplikasi	102.953.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0036		Penyediaan Akses Internet														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				27 Perangkat Daerah	2.153.356.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		2.370.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				1 Dokumen	213.081.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						42.720.000,00							400.000.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data Statistik Sektoral yang dapat dibagikan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah	-			45 Persentase	42.720.000,00						-	400.000.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produsen Data yang menyediakan Data Statistik Sektoral	-			40 Persentase	42.720.000,00			-	-	-	-	400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				100 %	15.120.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				100 %	13.800.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral</i>				100 %	13.800.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						134.825.400,00							332.831.400,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	<i>Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</i>	-			299	134.825.400,00						-	332.831.400,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah</i>	-			100 Persentase	134.825.400,00						-	332.831.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>				1 Laporan	9.856.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.886.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian</i>				45 Perangkat Daerah	106.785.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		296.945.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian</i>				1 Dokumen	18.184.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			J U M L A H					36.065.055.949,00							36.908.305.006,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam pada Tahun 2026 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya

5.1. Catatan Penting

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021 – 2026 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam tahun 2021 – 2026.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2026 terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dasar perubahan RKPD Tahun 2025, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2025.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tahun 2021 – 2026, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2026 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam).
2. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Tahun 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku;
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, maka seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025.

